

PEJABAT  
PENGELOLA  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
(PPID)

**LAPORAN  
TAHUNAN**

PPID BALAI BESAR PENGUJIAN  
STANDAR INSTRUMEN  
MEKANISASI PERTANIAN

---



**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2023**

**LAPORAN TAHUNAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN**  
**TAHUN 2023**

**I. Sekilas PPID BBPSI Mektan**

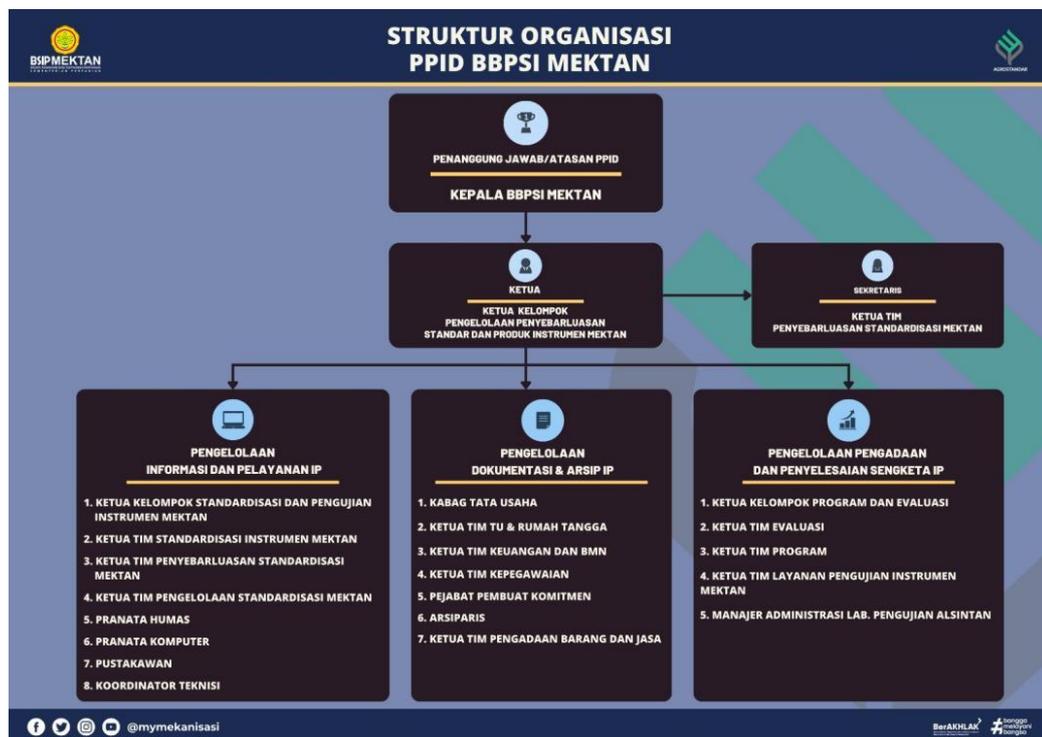
Tim PPID BBPSI Mektan dibentuk berdasarkan SK Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian Nomor : 781/HM.110/H.9/09/2023, tanggal 11 September 2023, tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian. Tugas pejabat PPID meliputi:

1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab lingkup BBPSI Mektan;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BBPSI Mektan;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan,dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi;
5. Menyusun laporan (bulanan dan tahunan) secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I Badan Litbang Pertanian dan tembusan kepada PPID Utama kementerian Pertanian;
6. Menyusun organisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan PPID;
7. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkup BBPSI Mektan;
8. Menyediakan akses Informasi bagi Pemohon Informasi;

Adapun fungsi pejabat PPID adalah bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BBPSI Mektan.

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BBPSI Mektan telah menetapkan visi dan misi. Visi yang telah ditetapkan adalah terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai peraturan perundang-undangan, Adapun visi yang telah ditetapkan adalah: 1). meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab; 2). meningkatkan dan mengembangkan kompetensi SDM dalam bidang pelayanan publik; serta 3). meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dengan telah ditanda tangannya komitmen pengelolaan KIP oleh semua Pejabat PPID serta tenaga pendukung dalam pengelolaan layanan informasi publik, serta ditetapkannya SK Kepala Balai Besar tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana lingkup BBPSI Mektan, dukungan sarana dan prasarana, petugas pelaksana layanan, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di BBPSI Mektan. Dalam pengelolaan PPID BBPSI Mektan menetapkan struktur organisasi seperti berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BBPSI Mektan Tahun 2023

Adapun cara memperoleh informasi publik lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian adalah sebagai berikut:

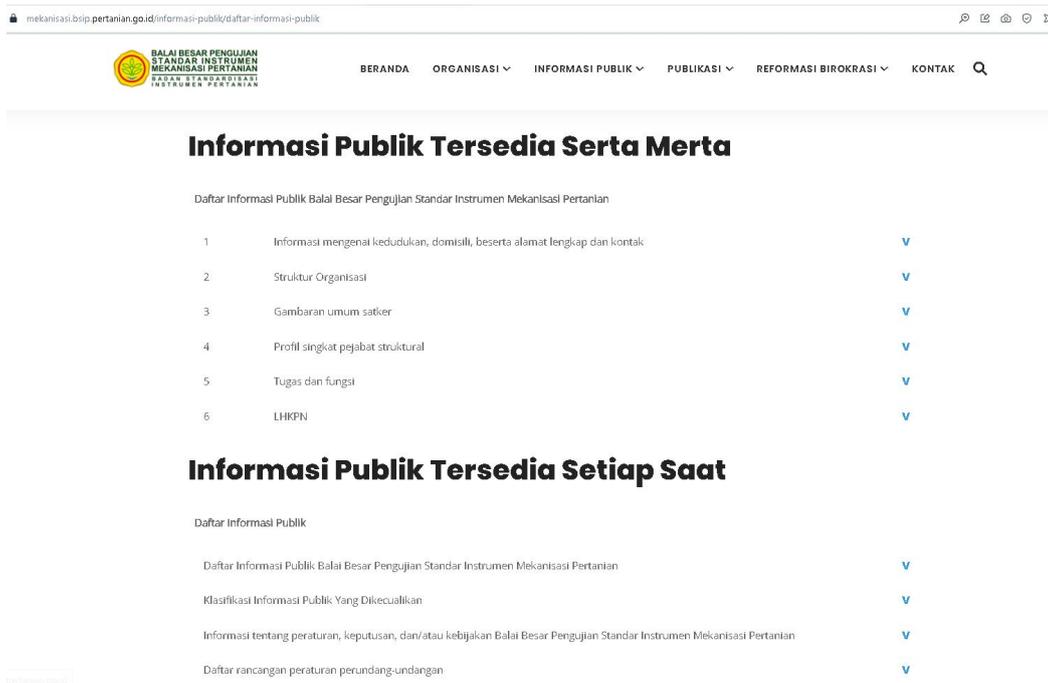
- Melalui *Website* atau Email: dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada *website* : <https://mekanisasi.bsip.pertanian.go.id> atau melalui email dengan alamat: [bsip.mektan@pertanian.go.id](mailto:bsip.mektan@pertanian.go.id) atau [bsip.mektan@gmail.com](mailto:bsip.mektan@gmail.com) atau [layanan.mektan@gmail.com](mailto:layanan.mektan@gmail.com);
- Melalui portal PPID BBPSI Mektan, dengan mengakses ke: <https://mekanisasi-litbang-ppid.pertanian.go.id> ;
- Melalui Telepon: dapat menghubungi 021-75675918;

- d. Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat PPID Pembantu Pelaksana BBPSI Mektan, dengan alamat Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian, Jl. Sinarmas *Boulevard*, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338;
- e. Datang langsung: datang langsung ke *desk* layanan informasi, dengan alamat Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian, Jl. Sinarmas *Boulevard*, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338.

## **II. Program dan Kegiatan Kerja PPID BBPSI Mektan**

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian dalam memberikan layanan informasi publik, salah satunya adalah dengan menggunakan sistem informasi berbasis web. Informasi publik yang wajib disajikan lewat web yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 1). informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan) meliputi : profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, laporan tahunan, serta laporan LAKIP; 2). Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (informasi tentang kondisi darurat, informasi tentang covid-19 dan lainnya); serta 3). Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi : daftar informasi publik, prosedur kerja dan rencana kerja BBPSI Mektan.

Dengan adanya informasi publik yang lengkap serta mudah diakses diharapkan masyarakat/stakeholder dapat dengan mudah mengetahui tentang tugas dan fungsi balai, struktur organisasi, program kerja, anggaran dan informasi lainnya, sehingga informasi keterbukaan publik bisa terlaksana. Selain informasi tersebut, BBPSI Mektan juga melakukan kegiatan pelayanan publik dalam bentuk email, telepon dan kunjungan secara langsung, serta melalui portal PPID.



Gambar 2. Informasi Publik yang telah dipublish dalam Web BBPSI Mektan

Selain itu juga dilakukan pengembangan sistem informasi untuk mendukung layanan informasi publik meliputi : sistem informasi hasil penelitian alat dan mesin pertanian, sistem informasi pengelolaan Dumas, Pengelolaan Perpustakaan sistem *Barcode*, serta system layanan alsintanlink.

## II.1. Pelaksanaan kegiatan Internal

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan BBPSI Mektan selain menyelenggarakan acara internal juga mengikuti acara yang dilakukan PPID Utama. Kegiatan internal bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan pelayanan publik agar terjalin komitmen antar pengelola PPID dan pimpinan unit serta meningkatkan kapasitas petugas layanan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Hasil kegiatan internal adalah sebagai berikut :

### II.1.1. Penandatanganan Komitmen Mendukung KIP

Berdasarkan amanah Undang-Undang Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen

Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan) sebagai badan publik wajib memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sekaligus menciptakan dan menjamin keterbukaan akses seluas-luasnya atas informasi publik yang dimiliki dengan mudah dan tepat kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BBPSI Mektan beserta seluruh tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BBPSI Mektan melakukan penandatanganan Komitmen Bersama bertempat di lapangan upacara kantor BBPSI Mektan bersamaan dengan pelaksanaan apel pagi rutin yang ditandatangani oleh struktur PPID Pelaksana BBPSI Mektan dengan disaksikan oleh seluruh karyawan dan karyawan BBPSI Mektan Tangerang.

Acara penandatanganan komitmen KIP ini diikuti oleh Kabag TU, koordinator dan subkoordinator lingkup BBPSI Mektan, Ketua Kelsa, koordinator teknis, manager administrasi laboratorium, PPK, Ketua Pejabat Pengadaan serta pejabat fungsional pranata humas, pranata komputer, arsiparis dan pustakawan.

Kepala Balai Besar, Agung Prabowo selaku Penanggung Jawab PPID menyampaikan bahwa BBPSI Mektan mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sebagai Unit Pelaksana Teknis/ UPT punya kewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sekaligus menciptakan dan menjamin keterbukaan akses seluas-luasnya atas informasi publik yang dimiliki dengan mudah dan tepat kepada masyarakat. Pelayanan publik juga merupakan bagian dari 8 area Reformasi Birokrasi yang harus selalu kita tingkatkan. Dengan adanya era teknologi informasi, maka inovasi layanan sangat diperlukan, dengan harapan agar layanan publik lebih mudah diakses, waktu layanan lebih singkat dan prosedurnya juga lebih mudah, tambahanya.

Poin penting dalam pelaksanaan komitmen KIP ini adalah adanya dukungan menyediakan anggaran yang cukup, sarana prasarana yang memadai, serta SDM yang kompeten. Penandatanganan ini merupakan bukti komitmen keseriusan BBPSI Mektan, karena keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap masyarakat. Diharapkan kepada seluruh Tim PPID dan tim pendukung untuk selalu berkomitmen dan bekerjasama agar pengelolaan KIP ini dapat berjalan lancar, sehingga hak-hak pengguna layanan dapat dilayani secara optimal.

Hal lain yang perlu diperhatikan tim PPID adalah agar selalu *update*/memperbaharui data-data terkait informasi publik, melakukan kegiatan berdasarkan SOP dan peraturan yang berlaku serta penyimpanan dokumentasi/kearsipan secara baik dan benar. Harapannya, setelah komitmen KIP ditandatangani dan semua aspek/ poin di atas terpenuhi, dapat menjadikan BBPSI Mektan sebagai Badan Publik Informatif di tahun 2023.



Gambar 3. Pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Komitmen KIP lingkup BBPSI Mektan

## **II.2. Pelaksanaan kegiatan Eksternal**

### **II.2.1. Bimtek Pelayanan Prima Penyusunan Standar Pelayanan Publik Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, 11-12 Mei 2023 di Bogor.**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat,

pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.



Gambar 4. Pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Komitmen KIP lingkup BBPSI Mektan

Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam arahan pembuka Kepala Biro OK. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mengajak untuk terus berinovasi di bidang pelayanan publik BSIP kementan, untuk memperkokoh posisi kementerian pertanian dari pelayanan publik yang baik. Proses transformasi kelembagaan Balitbangtan menjadi BSIP Kementan.

### **II.2.2. Bimtek Pelayanan Prima, Penyusunan Finalisasi dan Persiapan Public Hearing Standar Pelayanan Publik Lingkup BSIP, 06 - Juni 2023 di Jakarta.**



Gambar 5. Bimtek Pelayanan Prima, penyusunan Finalisasi dan Persiapan *Public Hearing* lingkup BSIP

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik

yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menindaklanjuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Penyusunan Standar Pelayanan Publik Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekjen Kementan pada tanggal 11-12 Mei 2023 di PSI Perkebunan, maka sesuai kesepakatan rapat Biro OK meminta agar BSIP segera menyusun, finalisasi dan persiapan *public hearing* SPP tingkat Satker Pusat dan Balai Besar Pengujian dan Penerapan lingkup BSIP. BSIP menyelenggarakan rapat penyusunan, finalisasi dan persiapan *public hearing* SPP tingkat Satker Pusat dan Balai Besar Pengujian dan Penerapan lingkup BSIP, Selasa, 06/06/2023 di Jakarta.

Hasil Identifikasi Jenis Layanan Di PSI Pangan/Horti/Bun Dan Keswan

- 1) Layanan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Mutu
- 2) Layanan Pengolahan Produk Instrumen Hasil Standardisasi
- 3) Layanan Penyebaran Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian

Jenis Layanan Di BB Pengujian (Non Komoditi)

- 1) Layanan RSNI
- 2) Layanan Pengujian, Kalibrasi Dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen
- 3) Layanan Modifikasi Desain, Model Serta Purwarupa Instrumen Mekanisasi Pertanian
- 4) Layanan Pengolahan Produk Instrumen Hasil Standardisasi
- 5) Layanan Penyebaran Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian

### **II.2.3. BBPSI Mektan Mengikuti Koordinasi Persiapan Pengisian SAQ dan Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, 11 Agustus 2023.**

Dalam rangka memenuhi ketersediaan dokumen informasi publik, BBPSI Mektan mengikuti koordinasi persiapan pengisian SAQ, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Lingkup

Kementerian Pertanian. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan dan Informasi Publik Selaku PPID Utama Kementerian Pertanian, guna membahas dan memenuhi ketersediaan dokumen informasi publik pada kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023 yang akan dilaksanakan Komisi Informasi Pusat pada seluruh badan publik.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik RI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, informasi publik yang wajib dibuka meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Paramater penilaian monev mencakup jenis informasi, kualitas informasi, pelayanan informasi, komitmen organisasi, sarana dan prasarana, serta digitalisasi.



Gambar 6. Koordinasi Persiapan Pengisian SAQ dan Monev KIP Kementan 2023

Menurut Wahyu Indarto selaku tim PPID Utama Kementan menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meminta dukungan dari seluruh PPID Pelaksana UK/UPT Kementerian Pertanian untuk menyiapkan dokumen informasi publik yang dibutuhkan oleh Komisi Informasi Pusat, selain itu juga dalam rangka persiapan monev internal agar seluruh PPID Pelaksana menyiapkan dokumen informasi publik pada website serta memenuhi permintaan pemohon informasi publik tentang pengadaan barang dan jasa.

Pada kesempatan ini juga dijelaskan secara detail dokumen-dokumen terkait pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, selesai tender dan telah serah terima pekerjaan pada tahun 2023 yang harus disiapkan oleh satker. Satker juga diminta untuk menambahkan menu informasi setiap saat pada websitenya sesuai Perki SLIP. dipaparkan informasi publik yang harus disiapkan oleh UK/UPT Kementan selaku PPID Pelaksana serta parameter penilaian monev KIP tahun 2023.

Melalui kegiatan ini diharapkan keterbukaan informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian termasuk di BBPSI Mektan dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan dan penting untuk mendukung partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengawasan lembaga publik.

#### **II.2.4. BBPSI Mektan mengikuti Koordinasi Penyusunan SAQ Pemeringkatan KIP 2023 Lingkup BSIP**

Dalam rangka Pemeringkatan KIP 2023 lingkup Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melaksanakan koordinasi penyusunan SAQ pemeringkatan KIP 2023. Dalam pengisian SAQ KIP 2023, BSIP berbeda dengan tahun sebelumnya karena BSIP merupakan Badan Publik yang baru 1 tahun berdiri sehingga untuk Laporan Kinerja Tahun 2022, Laporan Keuangan Tahun 2022 dan Daftar ASET tahun 2022 masuk informasi yang tidak dikuasai sehingga dalam pengisiannya menggunakan surat keterangan dari BSIP.

Capaian Kinerja dapat diisi dengan hasil pengujian sampai dengan bulan agustus 2023 dalam bentuk infografis. Renstra Eselon 1 menggunakan draft dari BSIP. Selanjutnya menyediakan Daftar Informasi Publik UK/UPT tahun 2023, beserta SK Penetapan Daftar Informasi Publik (format sesuai dengan PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik). Menyediakan dokumen surat menyurat pimpinan UK/UPT dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk file.



Gambar 7. Koordinasi Penyusunan SAQ Pemeringkatan KIP 2023 Lingkup BSIP

#### **II.2.5. BBPSI Mektan Raih Predikat Informatif dalam Penganugerahan KIP Lingkup Kementan Tahun 2023**

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan) meraih predikat Informatif dalam Rapat Koordinasi dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2023. Acara yang digelar oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian bertujuan memperkuat koordinasi keterbukaan informasi publik dan layanan kehumasan di lingkungan Kementerian tersebut.

Keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan UU KIP pada akhirnya akan berdampak positif, seperti transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik, akselerasi pemberantasan KKN, optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, persaingan usaha secara sehat, terciptanya pemerintahan yang baik dan tata kelola badan-badan publik serta akselerasi dalam demokrasi.

Pengatur terkait Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pengesahan Undang-undang

Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 8. Penganugerahan KIP Lingkup Kementan Tahun 2023

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting suatu negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang good governance, transparan, akuntabel, dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik dan partisipasi publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya yang menggunakan anggaran negara.

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan) dalam implementasi UU KIP tersebut yang tentunya dengan dukungan serta komitmen Pimpinan BBPSI Mektan berupaya untuk memberikan layanan yang cepat, tepat dan akurat kepada stakeholders pengguna dan penerap hasil standar instrumen mekanisasi pertanian.

Komitmen dan kesungguhan BBPSI Mektan dalam memberikan layanan publik yang prima dibuktikan dengan diraihnya Anugerah 10 besar Keterbukaan Informasi Publik untuk Unit Eselon II lingkup Kementerian Pertanian tahun 2023 dengan predikat Informatif.



Gambar 14. Piagam Anugerah KIP 2023

### III. Maklumat Layanan PPID

**Maklumat Layanan :** *"Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

### IV. SDM dan Anggaran PPID

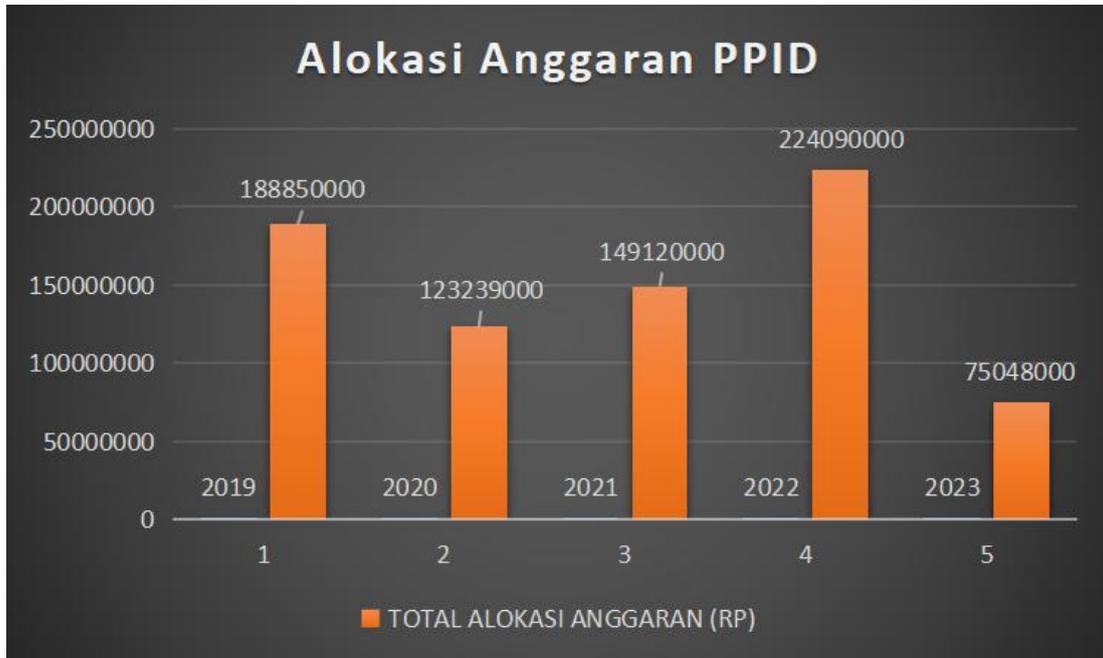
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BBPSI Mektan, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, telah dibentuk SK Tim PPID Pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian nomor SK Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian Nomor : 781/HM.110/H.9/09/2023, tanggal 11 September 2023, tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian.

Selain SKP PPID dan SK petugas layanan, BBPSI Mektan juga telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai SK Kepala Balai Besar nomor : 297/HM.120/H.9/04/2023, tanggal 3 April 2023. Salah satu isi dalam SPP ini adalah menetapkan kompetensi dan jumlah pelaksana layanan.

Petugas layanan informasi publik di BBPSI Mektan adalah pranata humas, pejabat fungsional khusus, serta petugas dan staff yang ditunjuk dengan surat penugasan, yang mempunyai tugas menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Sebagian Tim ini juga juga merangkap sebagai tim pengelola TI, perpustakaan digital, dan Medsos serta dalam rangka pengelolaan penyebaran serta pendokumentasian hasil standardisasi instrumen mekanisasi pertanian.

Pengelolaan informasi publik berbasis internet, dengan alamat <http://www.mekanisasi.litbang.pertanian.go.id>, dikelola oleh Kelompok Substansi Pengelolaan Penyebarluasan Standar dan Produk Instrumen Mekanisasi Pertanian. Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di BBPSI Mektan, pejabat PPID Pembantu Pelaksana diharapkan tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

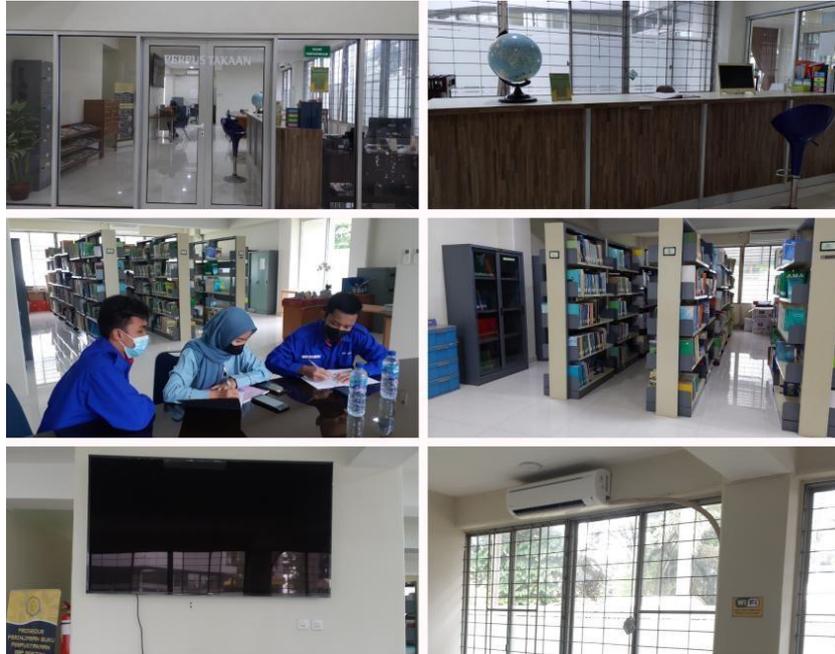
Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BBPSI Mektan sejak tahun 2019 telah mempunyai anggaran tersendiri. Kegiatan yang telah dilakukan terdiri dari pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik, pengumpulan bahan informasi publik, serta peningkatan kapasitas petugas SDM layanan publik serta monev pengelolaan informasi publik. Pada Tahun 2023 telah tersedia dana sebesar Rp. 75,048,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan judul kegiatan : Pengembangan Teknologi Informasi, Perpustakaan Digital dan Pengelolaan Pelayanan Publik. Grafik alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan Pelayanan public, seperti pada grafik di bawah ini.



Gambar 9. Grafik alokasi Anggaran mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan publik di BBPSI Mektan tahun 2019 - 2023

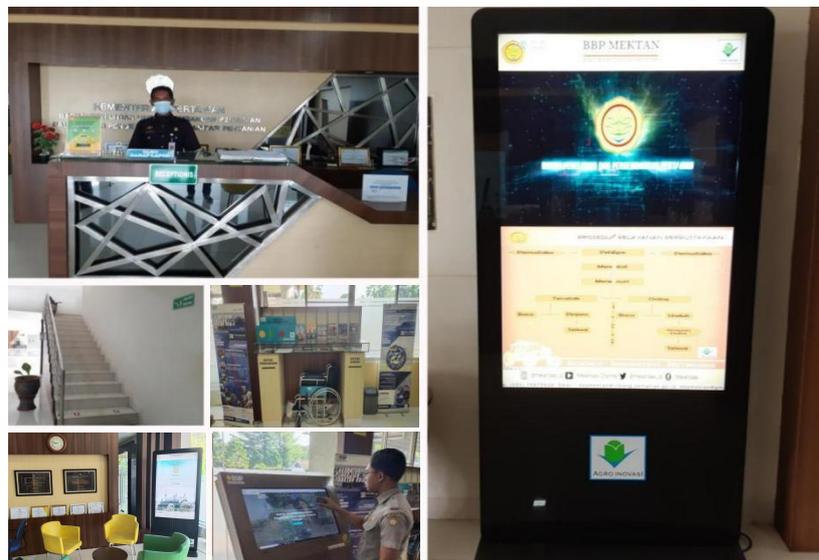
#### V. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

BBPSI Mektan telah memberikan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi : ruang perpustakaan dilengkapi meja *counter* layanan perpustakaan, TV, ruang baca & diskusi, komputer layanan pengunjung, rak leaflet/ bahan informasi, banner prosedur layanan perpustakaan, loker barang untuk pengunjung, AC dan *free WIFI*. Selain itu ruang *server* di ruang perpustakaan sudah terpisah dari ruangan staf dan ruang layanan perpustakaan, jadi tidak mengganggu layanan perpustakaan.



Gambar 10. Ruang Layanan Perpustakaan

Lobby kantor/ Ruang resepsionis BBPSI Mektan yang dilengkapi dengan sofa, bahan informasi/publikasi (buku dan *leaflet* teknologi mekanisasi pertanian), majalah, koran, SOP layanan dalam bentuk banner, Informasi layanan publik dalam *LCD digital poster*, TV LCD untuk informasi agenda kegiatan, TV digital layar sentuh untuk layanan online dan informasi tentang BBPSI Mektan, form layanan, kursi roda, jalur evakuasi dan lainnya.



Gambar 11. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Area Lobby Kantor

Ruang konsultasi PPID disediakan khusus dilengkapi dengan sofa, bahan informasi/publikasi (buku dan *leaflet* teknologi mekanisasi pertanian), majalah, koran, SOP layanan dalam bentuk *banner*, jam layanan, kotak saran, kotak pengaduan, form layanan, computer, printer yang bisa untuk *copy* dan *scanner* dan telpon.



Gambar 12. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Area ruang konsultasi

Ruang tunggu BBPSI Mektan telah dilengkapi dengan AC, sofa, bahan informasi/publikasi (buku dan *leaflet* teknologi mekanisasi pertanian), *banner* mendukung pengelolaan layanan informasi publik, *Free WIFI*, dan lainnya).



Gambar 13. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Pada Ruang Tunggu

Kawasan di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana rambu-rambu serta penunjuk arah untuk memudahkan pengguna layanan antara lain: rambu kecepatan maksimum, titik kumpul, penunjuk arah gedung, serta tempat parkir.



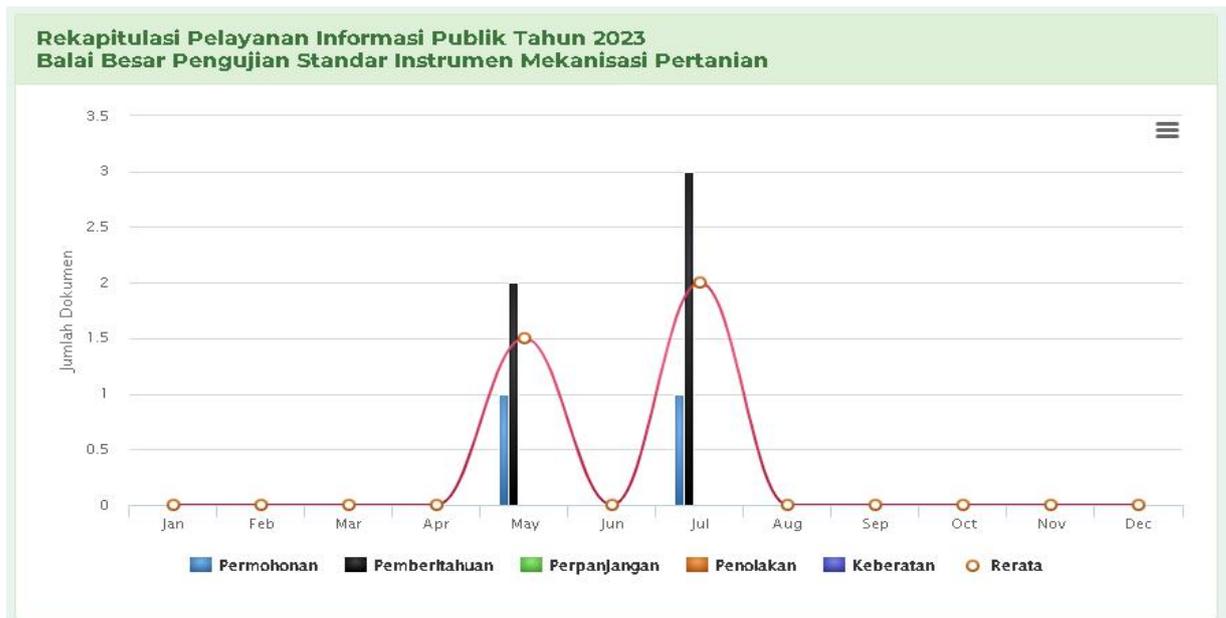
Gambar 14. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Pada Kawasan BBPSI Mektan

Selain fasilitas di atas, BBPSI Mektan juga telah menambahkan fasilitas ruang laktasi dalam upaya mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik.



Gambar 15. Sarana Ruang Laktasi BBPSI Mektan

## VI. Rekapitulasi Permohonan (jumlah informasi publik dalam 1 tahun)



Gambar 16. Grafik rekapitulasi informasi publik BBPSI Mektan bulan Januari – Desember 2023

## VII. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama & rata-rata pelayanan).

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 17. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik BBPSI Mektan bulan Januari – Desember 2023

## VIII. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan.

### Filter Laporan

**Periode Permohonan**  
2023-01-01 hingga 2023-12-31

**Usia Pemohon**  
Usia Minimal hingga Usia Maksima

**Jenis Laporan**  
Keberatan

**Pekerjaan**

**Kategori Laporan**  
Kepegawaian

Tampilkan Print

### Laporan

No.	No Keberatan	Tanggal Keberatan	Nama Pemohon Pekerjaan	E-mail	Penyelesaian	Tanggal Tanggapan	Nama Atasan
-----	--------------	-------------------	------------------------	--------	--------------	-------------------	-------------

Gambar 18. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan Informasi Publik BBPSI Mektan bulan Januari – Desember 2023

## IX. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan

### Filter Laporan

**Periode Permohonan**  
2023-01-01 hingga 2023-12-31

**Usia Pemohon**  
Usia Minimal hingga Usia Maksima

**Jenis Laporan**  
Penolakan

**Pekerjaan**

**Kategori Laporan**  
Kepegawaian

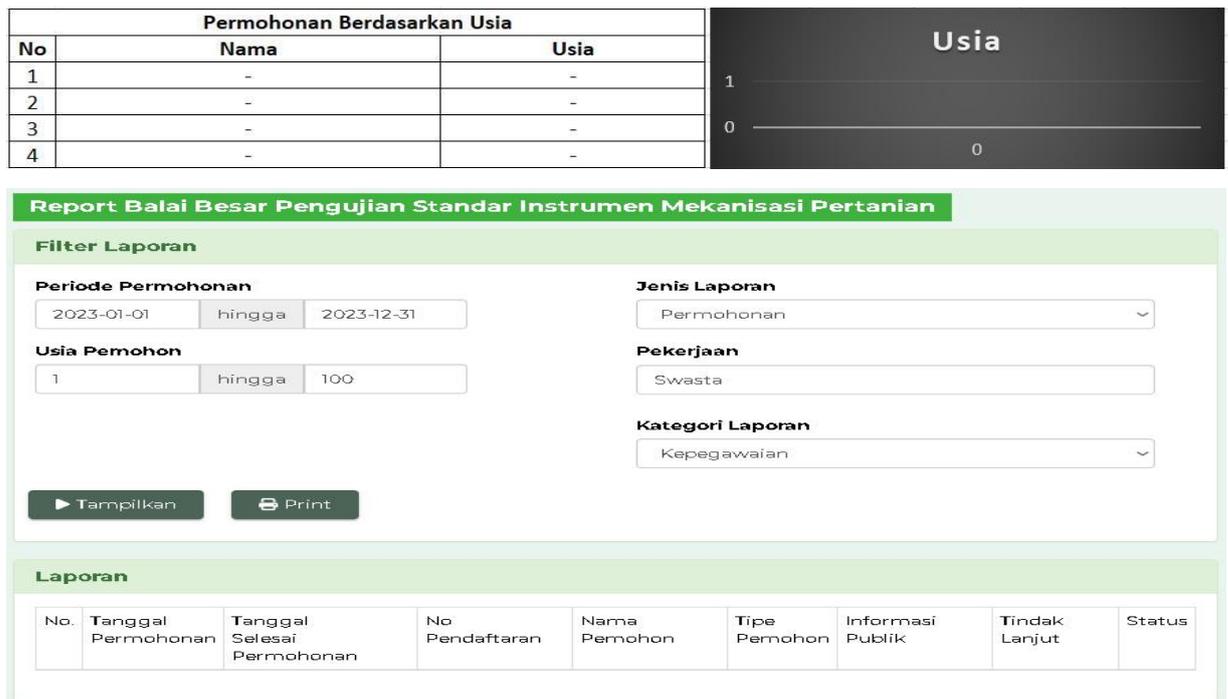
Tampilkan Print

### Laporan

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
-----	-------------------	--------------	--------------	--------------	------------------

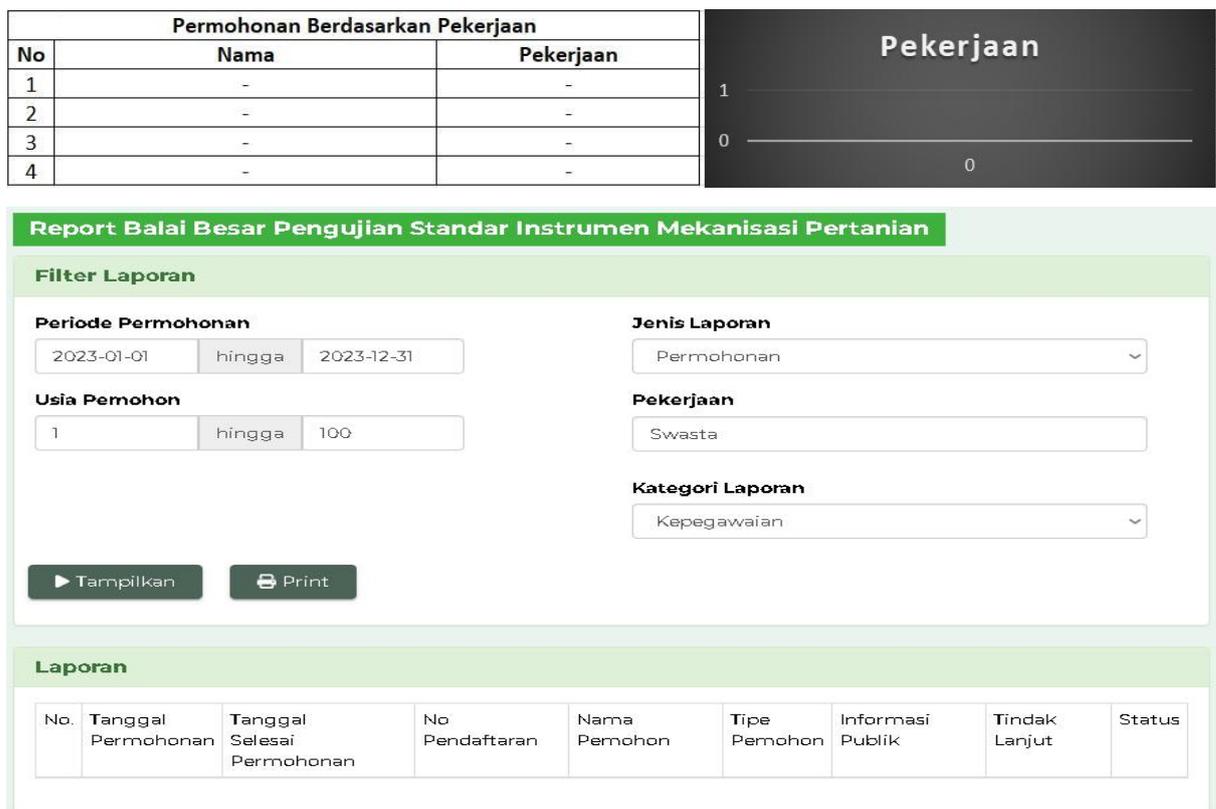
Gambar 19. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan Informasi Publik BBPSI Mektan bulan Januari – Desember 2023

## X. Jumlah pemohon berdasarkan usia



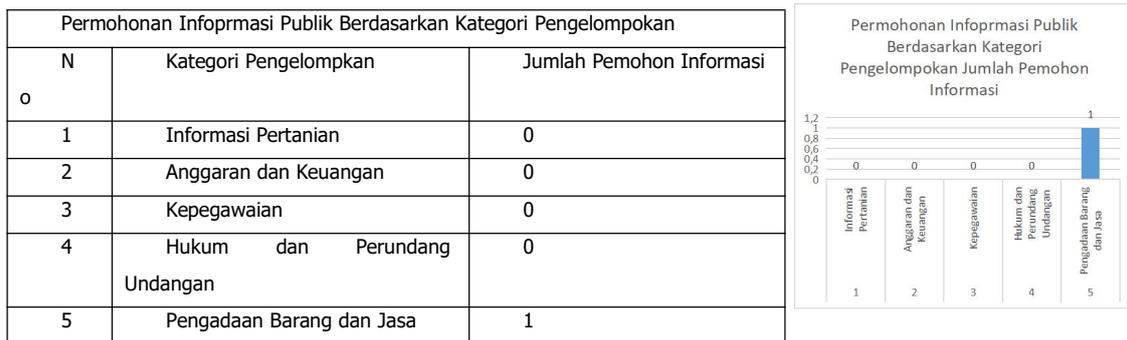
Gambar 20. Rekapitulasi Jumlah pemohon berdasarkan usia bulan Januari – Desember 2023

## XI. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan



Gambar 21. Rekapitulasi Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan bulan Januari – Desember 2023

## XII. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan kategori pengelompokan



Gambar 22. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan kategori pengelompokan bulan Januari – Desember 2023

## XIII. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di Masing-masing Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis

Mulai tahun 2017 telah telah dirintis pembuatan pembuatan PORTAL Mekanisasi Pertanian dalam bentuk sistem informasi internal. Tahun 2020 sistem informasi yang masih dikembangkan dan disempurnakan meliputi : Sistem layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan perpustakaan sistem barcode, aplikasi layanan pengaduan masyarakat dan aplikasi Alsintanlink. Sistem informasi yang tersedia di dalam Portal Mekanisasi Pertanian yang sudah dilakukan pada tahun 2017 ini akan terus dilakukan pembaharuan untuk tiap tahun berjalannya kegiatan.

Beberapa hal yang dilakukan agar aplikasi ini dapat berjalan dan berfungsi dengan baik maka komitmen penanggung jawab dari aplikasi harus ditekankan agar aplikasi dapat secara kontinue update data dan selalu dilakukan penyempurnaan agar berfungsi lebih baik. Apabila aplikasi ini telah berfungsi dan dapat diapiliasi dengan baik maka akan segera disosialisasikan kepada seluruh pegawai BBPSI Mektan agar dapat dimanfaatkan lebih optimal.

### 13.1. Layanan Dumas Online

Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Online adalah sebuah aplikasi berbasis website yang memudahkan pengunjung Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan) dalam memberikan pengaduan, saran dan masukan pada layanan yang ada di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan).

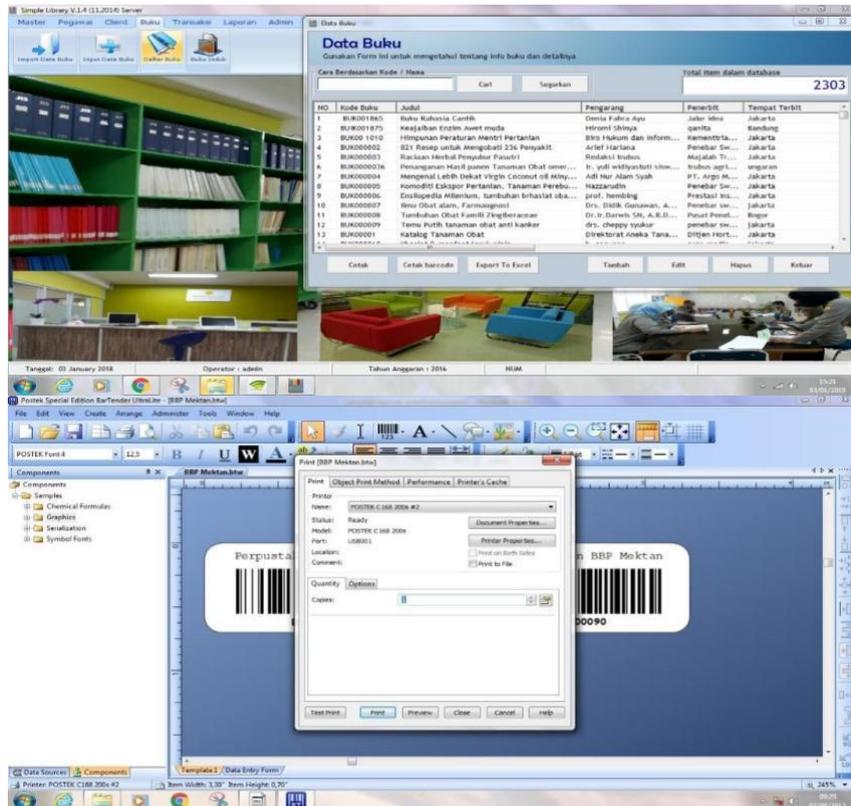
The screenshot shows a web browser window with the URL 103.254.170.106/dumas/. The page header includes the logo of the Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian and the text 'Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (DUMAS)'. There are two buttons: 'Cek Pengaduan' and 'Tentang Dumas'. The main content area is titled 'Layanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian'. The form contains the following fields:

Nomor Pengaduan	:	0009/08/20/dumas
Tanggal Pengaduan	:	03 Aug 2020
Nama Lengkap*	:	<input type="text"/>
NIK KTP*	:	<input type="text"/>
Email*	:	<input type="text" value="ex: info@gmail.com"/>
		<small>Gunakan Email yang valid</small>
Alamat Lengkap	:	<input type="text"/>
Jenis Pengaduan*	:	<input type="text" value="Pilih Kategori"/>

Gambar 23. Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat

### 13.2. Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Barcode

Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Barcode adalah sebuah aplikasi yang memudahkan petugas layanan perpustakaan dalam mencatat dan mencari informasi terkait koleksi buku yang ada di perpustakaan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan). Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Barcode juga dapat digunakan untuk mempermudah petugas layanan perpustakaan dalam memberikan layanan perpustakaan serta melakukan transaksi peminjaman buku yang ada di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan).



Gambar 24. Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Barcode

### 13.4. Aplikasi Sistariat KT 65-04

SISTARIAT KT 65-04 adalah Sistem Informasi Sekretariat Komite Teknis 65-04. Komite Teknis 65-04 merupakan Komite Teknis di Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian yang membahas Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) di Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian yang selanjutnya dijadikan dasar untuk pembuatan Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang mekanisasi pertanian mendukung pertanian maju, mandiri dan modern.

**Sekretariat :** Komisi Teknis (KT) 65-04 berkedudukan di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian, Jl. Sinarmas Boulevard, Situ Gadung, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang - Banten.



Gambar 25. Sistem Informasi SISTARIAT Komtek 65-04

#### XIV. PENUTUP

Dalam pengelolaan dokumen publik di BBPSI Mektan sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan serta pengelolaan database PPID internal perlu diubah ke sistem yang lebih efektif dan efisien, serta mudah dipahami oleh pengelola dan pelaksana.

Saran ke depan diharapkan pimpinan organisasi dan setiap bagian/bidang dalam suatu organisasi harus saling mendukung dan mempunyai komitmen bersama bahwa pelayanan publik adalah tugas bersama dalam suatu unit kerja, karena informasi publik berasal dari semua bagian/bidang dalam suatu unit kerja.

Tangerang, 26 Januari 2024

Ketua PPID,

Elita R. Widjaya, STP., M. Eng. Sc., Ph.D.

NIP. 19750604 199903 2 001

